

Analisis Proses Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

Putra Rizki Octaviano¹, Hn Hartikayanti²

^{1,2}Universitas Jenderal Achmad Yani

putrarizki_2460107016@ak.unjani.ac.id¹, heni.nurani@lecture.unjani.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of preparing a Risk-Based Annual Supervision Work Program (Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT) at the Regional Inspectorate of Bandung Regency. Risk-based supervision is considered essential to improve the effectiveness and efficiency of internal control, particularly in response to limited resources of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and the increasing complexity of risks in regional financial management. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with the PKPT drafting team, observation, and documentation review of supervision planning documents and relevant regulations. The results indicate that the preparation of the risk-based PKPT has been conducted in accordance with the Risk-Based Supervision Planning Guidelines (PPBR) issued by BPKP, starting from the development of the audit universe, risk assessment, to the determination of supervision priorities. However, several challenges remain, including suboptimal risk identification and mapping across all regional work units, limited support from information systems or applications, and delays in central government supervision policies that affect the finalization of the PKPT document. This study concludes that although the risk-based PKPT preparation at the Regional Inspectorate of Bandung Regency has been implemented in line with the regulatory framework, improvements are still needed in risk management practices, inter-agency coordination, and the utilization of information technology to enhance the effectiveness and focus of internal supervision.

Keywords : Annual Supervision Work Program (PKPT), internal supervision, risk-based audit, APIP, Regional Inspectorate.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Pendekatan pengawasan berbasis risiko dipandang penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan internal, terutama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kompleksitas risiko pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tim penyusun PKPT, observasi, serta studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan pengawasan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan PKPT berbasis risiko telah dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang ditetapkan oleh BPKP, dimulai dari penyusunan audit universe, penilaian risiko, hingga penentuan prioritas pengawasan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain belum optimalnya identifikasi dan pemetaan risiko pada seluruh perangkat daerah, keterbatasan dukungan aplikasi atau sistem informasi, serta keterlambatan kebijakan pengawasan dari pemerintah pusat yang memengaruhi finalisasi dokumen PKPT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penyusunan PKPT berbasis risiko di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung telah berjalan sesuai kerangka regulasi, diperlukan penyempurnaan pada aspek manajemen risiko,

koordinasi lintas pihak, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pengawasan internal dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata kunci : PKPT, pengawasan internal, audit berbasis risiko, APIP, Inspektorat Daerah.

PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas atas penggunaan anggaran. Khususnya pada Pemerintahan Daerah yang sebagian besar sumber anggarannya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah Pusat melalui Inspektorat ingin adanya pertanggungjawaban pada Pemerintahan Daerah. Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, Pendelegasian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang tersebut sebagai penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah berdasarkan aspek otonomi daerah yang disebut Desentralisasi. Sebagai lembaga pengawasan internal, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan audit internal terhadap pengelolaan keuangan daerah serta memastikan bahwa pengelolaan tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tugas untuk memastikan akuntabilitas dan tata kelola kinerja pemerintahan bekerja baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Inspektorat Daerah dalam melakukan Kegiatan Pengawasan mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun 1 tahun anggaran sebelumnya. PKPT merupakan rencana pengawasan yang mengatur kegiatan pengawasan untuk satu tahun anggaran. Seiring dengan perkembangan dan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan PKPT menggunakan pendekatan berbasis risiko dipandang sebagai langkah yang efektif untuk memfokuskan pengawasan pada area yang memiliki risiko tinggi. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efisien dengan memprioritaskan sumber daya pada area yang memiliki potensi kerugian atau penyalahgunaan anggaran yang lebih besar terlebih dengan keterbatasan Sumber Daya APIP dengan jumlah objek Pengawasan yang banyak. Pentingnya pendekatan dengan berbasis risiko dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pelaksanaan kegiatan pengawasan. Karena dalam Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chairunnisa (2020) mengungkap bahwa pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung belum efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian laporan keuangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung masih terkendala, khususnya pada tahap

mengidentifikasi risiko dan mengatasi area-area berisiko yang dapat memengaruhi kebenaran pada laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan kata lain, prosedur dan rencana pengawasan di yang disusun belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berbasis risiko, sehingga pengawasan cenderung tidak tepat sasaran pada area yang berisiko. Hal ini berimplikasi pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat yang tidak tepat dalam mendeteksi masalah dengan risiko tinggi, yang ditandai dengan penyimpangan yang tidak terdeteksi tepat waktu.

Gejala permasalahan ini tidak hanya berdampak pada laporan keuangan, tetapi juga pada sistem pengawasan internal di pemerintah daerah itu sendiri. Ketika perencanaan program pengawasan tahunan tidak didasarkan pada risiko, konsekuensinya adalah efisiensi dan efektivitas pengawasan akan menurun. Pengawasan internal yang tidak efektif berpotensi mengakibatkan meningkatnya risiko penyimpangan anggaran, pemborosan sumber daya, hingga peluang terjadinya *fraud* atau korupsi yang tidak terdeteksi. Hal ini dapat melemahkan upaya pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*. Yang mana Prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP mencakup efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip ini sangat bergantung pada kuatnya sistem pengendalian dan pengawasan internal. Apabila Inspektorat selaku APIP tidak mampu berfungsi secara efektif, akuntabilitas pemerintah daerah akan menurun dan tujuan pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Bandung dapat terganggu. Dengan kata lain, permasalahan khusus di Inspektorat Kabupaten Bandung tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki pendekatan pengawasan internal demi mencegah dampak negatif yang lebih luas.

Dari perspektif yang lebih umum, upaya peningkatan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah tengah menjadi fokus nasional. Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan regulasi terkait mendorong APIP di setiap daerah untuk meningkatkan kapabilitasnya. Salah satu ukuran keberhasilan APIP adalah tingkat kapabilitas APIP (*APIP capability level*). Banyak pemerintah daerah menargetkan level 3 (terdefinisi/delivered) sebagai standar minimum kapabilitas APIP, di mana ini berarti fungsi pengawasan sudah terintegrasi dengan manajemen risiko dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Inspektorat Kabupaten Bandung sendiri telah berupaya meningkatkan kapabilitasnya dengan menunjukkan bahwa kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bandung telah mencapai Level 3 pada tahun 2023 sebagaimana yang tercantum pada Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, hal ini meningkat dari level sebelumnya pada tahun 2022. Pencapaian ini mengindikasikan komitmen untuk memenuhi standar nasional pengawasan intern, namun juga membawa tuntutan agar pendekatan pengawasan yang dilakukan termasuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) selaras dengan praktik terbaik, salah

satunya melalui perencanaan berbasis risiko. Dengan diperolehnya level kapabilitas APIP yang mencapai level 3, maka pendekatan pengawasan telah berbasis risiko.

Pendekatan pengawasan berbasis risiko merupakan metode yang diharapkan dapat menjawab tantangan atas keterbatasan sumber daya dan kompleksitas risiko di sektor publik. Berdasarkan Artikel Inspektorat Kabupaten Tabalong (2023). Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) didefinisikan sebagai metodologi pemeriksaan yang memfokuskan kegiatan audit pada area atau aspek yang paling berisiko, dengan tujuan memastikan bahwa risiko-risiko tersebut telah dikelola dalam batas toleransi yang ditetapkan manajemen. Audit berbasis risiko dilakukan dengan mengevaluasi menyeluruh terhadap risiko-risiko yang ada baik strategis, finansial, operasional, kepatuhan, dan risiko lainnya yang dihadapi organisasi. Area dengan tingkat risiko tinggi menjadi prioritas utama untuk diaudit, sehingga manajemen memperoleh masukan tentang area mana yang paling rentan dan membutuhkan perbaikan pengendalian. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman atas konteks risiko yang dihadapi oleh organisasi, auditor tidak lagi hanya memeriksa kepatuhan terhadap prosedur semata, melainkan menilai bagaimana manajemen mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko tersebut dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi dari The Institute of Internal Auditors (IIA), yang menyatakan bahwa perencanaan audit intern tahunan sebaiknya berbasis risiko sehingga kegiatan pengawasan dapat difokuskan pada program kerja yang paling berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi (Adelia, 2023). Dengan demikian, pengawasan internal akan lebih tepat guna dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.

Dokumen PKPT yang digunakan sebagai dasar pengawasan APIP perlu diimplementasikan dengan Manajemen Risiko. Diperlukan daftar Risiko dari tiap Objek Pengawasan sehingga nantinya dapat dikelola dan diurutkan risiko mana yang menjadi prioritas pengawasan. Penyusunan PKPT berbasis Risiko ini dimulai dengan mengidentifikasi *audit universe*, yakni keseluruhan program, kegiatan, dan unit kerja yang berpotensi menjadi objek pengawasan di tahun sebelumnya. *Audit Universe* ini sebagai landasan awal dalam memahami seluruh risiko atas objek pengawasan yang akan diaudit. Setelah *Audit Universe* dibuat, selanjutnya dilakukan tahap penilaian dan evaluasi hingga ditentukan prioritas pengawasan yang akan dimasukkan kedalam PKPT. Selain menggunakan dokumen manajemen risiko dari tiap OPD, Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung menggunakan risiko yang berada dalam aplikasi Siskeudes. Hal ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit Dana Desa yang akan diselenggarakan di tahun berikutnya. Selain itu, terdapat pula area pengawasan yang wajib dimasukkan ke dalam PKPT yaitu pengawasan yang sudah menjadi *mandatory* dari kebijakan pengawasan untuk tahun berikutnya. Sehingga PKPT berisi jenis pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat selama satu tahun yang terfokus pada area yang memiliki risiko tinggi serta *mandatory* pengawasan

sesuai kebijakan terbaru, lengkap dengan rencana sumber daya dan metodologi yang disesuaikan.

Fenomena empiris yang mendukung keyakinan tersebut mulai bermunculan di berbagai daerah. Inspektorat Daerah Kota Bogor, misalnya, pada tahun 2023 telah melaksanakan penyusunan PKPT Berbasis Risiko untuk tahun 2024 sebagai bagian dari inovasi pengawasan mereka. Proses penyusunan di Kota Bogor melibatkan berbagai *stakeholder* lintas sektor (OPD, lembaga masyarakat, hingga sektor swasta) dan dilakukan melalui diskusi intensif untuk mengidentifikasi potensi risiko di bidang keuangan, tata kelola, lingkungan, dan pelayanan publik. Selain itu, penyusunan PKPT di Kota Bogor sudah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data, sehingga penentuan prioritas pengawasan menjadi lebih berbasis bukti dan tren risiko aktual. Hasilnya, program pengawasan yang dirumuskan diharapkan lebih tepat sasaran dalam menyoroti area rawan (Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2023). Sebaliknya, terdapat pula daerah yang menghadapi tantangan dalam penerapan penuh manajemen risiko, yang berdampak pada efektivitas PKPT berbasis risiko mereka. Penelitian Oktapiani dkk.(2021) mengenai penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menemukan bahwa meskipun Inspektorat Kabupaten Bandung Barat sudah mencoba memasukkan audit berbasis risiko dalam PKPT, implementasinya masih belum optimal. Hal ini terutama karena budaya manajemen risiko di perangkat daerah belum mapan, masih banyak OPD belum memiliki peta risiko formal atas program dan kegiatannya. Belum adanya sosialisasi, pelatihan, dan kesadaran pada tiap OPD membuat pelaksanaan Manajemen Risiko belum berjalan optimal. Akibatnya, Penyusunan PKPT berbasis Risiko juga belum disusun secara optimal oleh Inspektorat Daerah, hal ini juga berpengaruh pada pengawasan yang dilakukan. Kasus di Kabupaten Bandung Barat ini menggambarkan bahwa tanpa dukungan implementasi manajemen risiko yang komprehensif, audit berbasis risiko sulit mencapai tujuannya secara penuh. Diperlukan penyelarasan antara kerangka manajemen risiko di seluruh OPD dengan proses penyusunan PKPT di Inspektorat. Dengan kata lain, Inspektorat Daerah harus berperan aktif tidak hanya sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai *Compliance Office for Risk Management* yang memastikan setiap OPD mengidentifikasi dan mengelola risikonya, sehingga data risiko tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pengawasan.

Namun, meskipun pendekatan berbasis risiko ini banyak dianggap lebih efektif, implementasinya di tingkat Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah melakukan analisis mendalam terhadap proses penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Artinya, penelitian akan menelusuri bagaimana Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung merencanakan program pengawasannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko, langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam menyusun PKPT berbasis risiko, serta sejauh mana implementasi PKPT

tersebut efektif mencapai tujuan pengawasan yang diinginkan. Efektivitas di sini dapat diukur dari berbagai indikator, misalnya: apakah sasaran pengawasan (objek audit) yang dipilih benar-benar mencakup area berisiko tinggi, bagaimana tingkat penyelesaian rencana audit dalam PKPT tersebut, temuan strategis apa yang dihasilkan, dan apakah rekomendasi hasil pengawasan mampu ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: Apakah perencanaan pengawasan berbasis risiko di Inspektorat Kabupaten Bandung telah disusun secara optimal dan efektif dalam meningkatkan kinerja pengawasan internal?

Pentingnya penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kontribusi akademik dan manfaat praktis. Dari sisi akademik, studi mengenai implementasi *risk-based audit planning* dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia masih relatif terbatas. Kebanyakan literatur terdahulu fokus pada konsep atau model ideal (misalnya, Chairunnisa (2020) yang merancang prosedur *review* berbasis risiko atau kajian Oktapiani dkk. (2021) mengenai kerangka manajemen risiko di Bandung Barat) dan belum mengevaluasi secara nyata dari PKPT berbasis risiko di lapangan. Dengan melakukan penelitian ini, yang dimulai dari kasus spesifik Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam penerapan pengawasan berbasis risiko. Temuan empiris dari penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu akuntansi sektor publik dan auditing, khususnya terkait efektivitas pengawasan intern berbasis risiko. Secara teoretis, studi ini dapat memverifikasi dan memodifikasi model-model perencanaan pengawasan berbasis risiko yang ada dengan fakta-fakta empiris di tingkat pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menjembatani gap antara pedoman/teori dengan praktik di lapangan, sehingga akademisi maupun praktisi dapat memperoleh *insight* tentang apa yang bekerja dan apa yang perlu diperbaiki dalam kerangka *risk-based audit* di sektor publik.

Dari sisi praktis, urgensi penelitian ini selaras dengan kebutuhan nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkrit bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dalam menyempurnakan proses penyusunan PKPT berbasis risiko ke depan. Misalnya, jika ditemukan bahwa tahapan identifikasi risiko belum optimal, rekomendasi dapat berupa peningkatan pelatihan manajemen risiko bagi auditor, penyempurnaan alat bantu penilaian risiko, atau kolaborasi dengan unit lain seperti Bapperida untuk sinkronisasi risiko strategis daerah. Implementasi perbaikan tersebut akan membantu Inspektorat melaksanakan peran pengawasan yang lebih tepat sasaran dalam mencegah korupsi dan penyimpangan, serta memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai rencana. Lebih luas, Pemerintah Kabupaten Bandung dapat merasakan manfaat melalui peningkatan kepercayaan publik. Pengawasan internal yang efektif akan bermuara pada laporan keuangan yang andal yaitu dengan membantu mempertahankan opini WTP dari

BPK, penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran, dan pelayanan publik yang lebih baik karena setiap risiko telah diantisipasi oleh APIP.

Tak kalah penting, studi ini relevan secara strategis dengan agenda nasional pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. KPK dan BPKP dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong penguatan peran APIP sebagai *early warning system* dalam pemerintahan daerah. Melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK, salah satu aspek yang dinilai adalah kapabilitas APIP dan penerapan manajemen risiko di pemerintah daerah. Penelitian ini mendukung agenda tersebut dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki dalam sistem pengawasan intern berbasis risiko. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan seperti Kementerian Dalam Negeri atau BPKP, dalam menyusun regulasi atau pedoman teknis lebih lanjut tentang pengawasan berbasis risiko. Di tingkat daerah lainnya, hasil kajian ini juga dapat direplikasi atau menjadi bahan pembelajaran. Kabupaten/kota lain yang karakteristiknya mirip Bandung dapat mengantisipasi kendala serupa dan mengadopsi *best practice* yang direkomendasikan. Dengan demikian, penyebaran pengetahuan dari penelitian ini berpotensi meningkatkan kapasitas pengawasan internal secara lebih merata di berbagai wilayah.

Untuk pemenuhan bahan penelitian, penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber dari Tim Penyusun PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung yaitu ketua Tim Penyusun PKPT, yang saat ini menjabat sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Muda di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Berikut adalah hasil wawancara terkait survei awal yang telah dilakukan penulis sebagaimana tabel di bawah berikut.

Tabel Error! No text of specified style in document.-1 Hasil Wawancara Awal

No.	Pertanyaan	Jawaban	Masalah
1.	Apakah Penyusunan PKPT sudah mempertimbangkan risiko?	“PKPT sudah disusun berdasarkan risiko yang dibuat oleh masing-masing objek pemeriksaan, namun pembuatan risiko masih belum optimal berdasarkan hasil evaluasi Manajemen Risiko”	Penyusunan Risiko oleh Objek Pemeriksaan belum dilakukan Optimal

No.	Pertanyaan	Jawaban	Masalah
2.	Bagaimana mengurutkan prioritas audit dalam PKPT untuk objek yang akan diaudit?	“Prioritas Audit diurutkan berdasarkan beberapa hal yakni, risiko tertinggi, tematik audit, kebijakan pusat, serta amanat kepala daerah. Kita perlu melakukan koordinasi baik ke pusat maupun kepala daerah sebagai optimalisasi pembuatan PKPT yang terkadang kebijakan pusat sendiri belum diumumkan ketika kita sedang menyusun PKPT”	Informasi dari kebijakan pusat/ rekan instansi pengawasan lain mengenai kebijakan pengawasan terkadang masih belum diumumkan ketika proses penyusunan PKPT berlangsung
3.	Apakah PKPT selalu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilannya?	“PKPT dilakukan evaluasi tiap Semester. Berupa perhitungan capaian laporan yang telah dibuat”	Perlu dilakukan pendalaman analisis atas evaluasi PKPT
4.	Seberapa sulit penyusunan PKPT?	“Penyusunan menggunakan Kertas Kerja berbasis Excel dan belum menggunakan aplikasi	Belum ada aplikasi untuk mempermudah penyusunan PKPT

No.	Pertanyaan	Jawaban	Masalah
		membuat penyusunan masih sulit dilakukan”	

Sumber: Data yang sudah diolah

Dari hasil survei awal ini terlihat bahwa Penyusunan PKPT di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung masih belum optimal. Hambatan dari Internal maupun Eksternal masih menjadi kendala dalam penyusunan PKPT ini. Untuk hambatan Eksternal yaitu waktu antara penyusunan PKPT dan terlambat terbitnya kebijakan pengawasan dari pusat membuat Dokumen PKPT tidak optimal. Kebijakan dari pusat sendiri antara lain, seperti Kebijakan Kemendagri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta BPKP dan KPK yang memerlukan kelengkapan isi dokumen PKPT untuk penilaian Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) serta *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) KPK RI sebagai indikator pemenuhan daerah. Untuk hambatan internal yaitu proses identifikasi risiko belum dilakukan secara menyeluruh pada seluruh Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan dalam PKPT. Selain itu, belum adanya aplikasi untuk penyusunan PKPT juga menjadi kendala dalam proses penyusunannya.

METODE PENELITIAN

“Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu.”

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2023,18) pengertian metode kualitatif adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti bermaksud memahami fenomena secara mendalam dalam kondisi yang alamiah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menjadi instrumen kunci dan berinteraksi langsung dengan sumber data, sehingga data yang diperoleh lebih bermakna dan kontekstual dibanding generalisasi statistik. Adapun metode yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mencari fakta dengan interpretasi yang tepat mengenai situasi, hubungan, kegiatan, pandangan, maupun pengaruh suatu fenomena.

Melalui metode deskriptif kualitatif ini, peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis proses dan praktik penyusunan PKPT berbasis risiko di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyusunan PKPT Berbasis Risiko

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan PKPT Berbasis Risiko di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung telah mengikuti tahapan yang logis dan saling terkait. Tahap memahami proses bisnis, misalnya, sudah dilakukan melalui pembelajaran dokumen dan informasi awal auditi. Secara konsep, langkah ini tepat karena pemahaman proses bisnis menjadi dasar untuk mengetahui titik rawan dan potensi penyimpangan.

Namun, proses tersebut masih menghadapi kendala pada kualitas dan ketersediaan dokumen proses bisnis. SOP yang tidak mutakhir atau tidak implementatif dapat melemahkan ketepatan identifikasi risiko pada tahap awal. Akibatnya, tim perlu melakukan penggalan tambahan untuk memahami kondisi nyata di lapangan, yang pada akhirnya menambah beban kerja dan berpotensi memengaruhi ketepatan pemetaan risiko.

Tahap menyusun/memutakhirkan *Audit Universe* menunjukkan bahwa pemetaan objek dilakukan secara luas agar cakupan auditi tetap terpetakan. Di satu sisi, pendekatan ini bermanfaat untuk memastikan tidak ada objek yang tidak tercatat dari peta pengawasan. Namun di sisi lain, *audit universe* yang luas menuntut proses skoring dan pemeringkatan yang disiplin, agar prioritas pengawasan tidak melebar dan tetap fokus pada area yang paling kritis.

Pada aspek menilai manajemen risiko, penelitian menunjukkan bahwa penilaian kematangan Manajemen Risiko (MR) telah dilakukan dengan instrumen dan pendampingan. Hal ini mendukung penyusunan PKPT berbasis risiko karena input risiko menjadi dasar utama prioritas. Meski demikian, tidak lengkapnya *risk register* di sebagian perangkat daerah menjadi hambatan penting. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan implementasi pengelolaan risiko di perangkat daerah agar proses perencanaan pengawasan berbasis risiko lebih kuat dan berbasis bukti.

Tahap strategi pengawasan dan komposisi bobot memperlihatkan bahwa proses penyusunan PKPT tidak semata-mata hanya mengandalkan penilaian risiko. Keputusan strategis juga dipengaruhi faktor kebijakan, *mandatory*, arahan pimpinan, dan kondisi aktual daerah. Ini merupakan karakteristik perencanaan pengawasan di sektor publik. Dalam konteks akuntabilitas, konsekuensinya adalah perlunya justifikasi yang terdokumentasi agar penyesuaian prioritas tetap transparan dan dapat ditelusuri alasan serta dasar pertimbangannya.

Tahap Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan dan Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan menunjukkan adanya mekanisme diskusi tim dan evaluasi bersama yang membantu menjaga objektivitas penilaian. Ini merupakan

kekuatan proses karena keputusan tidak bergantung pada satu orang. Akan tetapi, variasi terkait peninjauan ulang skor dan konsistensi *review* perlu diperjelas. Tanpa mekanisme *review* yang konsisten, dokumen PKPT berpotensi kurang adaptif terhadap perubahan risiko yang bisa muncul sepanjang tahun berjalan.

Pada tahap penyampaian informasi risiko, usulan jakwas dan usulan PKPT kepada pimpinan menunjukkan adanya kontrol manajerial pada produk akhir PKPT. Secara kelembagaan, ini wajar karena PKPT adalah dokumen yang harus selaras dengan prioritas organisasi dan kebijakan pengawasan. Namun, komunikasi risiko yang belum merata kepada auditi menunjukkan ruang perbaikan agar perangkat daerah memahami dasar prioritas pengawasan dan dapat melakukan perbaikan preventif lebih dini.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa proses penyusunan PKPT berbasis risiko sudah berjalan dengan alur yang sistematis, tetapi kualitasnya masih dipengaruhi oleh mutu dokumen pendukung, kualitas *input* manajemen risiko perangkat daerah, konsistensi *review* skoring, serta kebutuhan dokumentasi justifikasi dan komunikasi risiko.

Keterkaitan Temuan dengan Implementasi Semester Berjalan

Walaupun penelitian ini berfokus pada proses penyusunan, data realisasi Semester I memberikan konteks penting bahwa pelaksanaan PKPT dipengaruhi dinamika penugasan dan sumber daya. Variasi realisasi antar jenis kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak selalu sejalan dengan target semester, baik karena prioritas penugasan lain, penyesuaian jadwal, maupun keterbatasan waktu efektif.

Dalam konteks perbaikan proses, realisasi semester dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan PKPT periode berikutnya. Kegiatan yang belum tercapai perlu dianalisis penyebabnya agar dapat memperbaiki perencanaan (misalnya penjadwalan, penetapan prioritas, atau pembagian sumber daya). Sebaliknya, kegiatan yang tercapai dapat menjadi praktik baik yang dipertahankan.

Keterkaitan temuan proses penyusunan dengan implementasi semester menunjukkan bahwa PKPT yang baik tidak hanya tepat secara dokumen, tetapi juga perlu realistis dan adaptif agar dapat dilaksanakan secara optimal dalam keterbatasan sumber daya serta dinamika penugasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan PKPT berbasis risiko di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung telah dilaksanakan melalui tahapan yang mencakup pemahaman proses bisnis auditi, penyusunan/pemutakhiran *audit universe*, penilaian kematangan manajemen risiko, penentuan strategi dan bobot pengawasan, penyusunan skoring risiko, pemeringkatan prioritas area pengawasan, serta penyampaian dan pengesahan dokumen PKPT melalui persetujuan pimpinan dan formalisasi menjadi Keputusan

Bupati. Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memfokuskan pengawasan pada area yang dipandang berisiko dan penting bagi pemerintah daerah, sehingga sumber daya pengawasan diarahkan pada prioritas yang dianggap paling membutuhkan perhatian.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi proses penyusunan PKPT berbasis risiko. Kendala yang muncul antara lain keterbatasan ketersediaan dan kemutakhiran dokumen proses bisnis, kualitas dokumen manajemen risiko (risk register) yang belum selalu lengkap, perlunya konsistensi mekanisme review pada skoring dan pemeringkatan, serta kebutuhan penguatan dokumentasi justifikasi atas penyesuaian prioritas yang dipengaruhi kebijakan/*mandatory* dan arahan pimpinan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan pengawasan berbasis risiko sangat ditentukan oleh kualitas *input*, keteraturan prosedur *review*, serta alasan perubahan prioritas dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi informasi risiko kepada auditi belum merata. Kondisi tersebut berdampak pada pemahaman auditi yang belum optimal terhadap dasar penetapan prioritas pengawasan, sehingga pada beberapa situasi dapat berpengaruh terhadap keterlibatan auditi dan keselarasan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan. Dengan kata lain, aspek komunikasi menjadi bagian penting yang perlu diperkuat agar proses penyusunan PKPT tidak hanya akuntabel secara internal, tetapi juga dapat dipahami oleh pihak yang menjadi objek pengawasan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa proses penyusunan PKPT berbasis risiko di Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan alur yang jelas, tetapi masih memerlukan penguatan pada kualitas *input* dan konsistensi mekanisme agar prioritas pengawasan semakin tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, E. (2023). *Inspektorat Gelar Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko*. Diambil kembali dari Pemda Kabupaten Magelang: <https://magelangkab.go.id/home/detail/inspektorat-gelar-diklat-perencanaan-pengawasan-berbasis-risiko/5968#:~:text=Pendekatan%20terbaik%20menurut%20The%20Institute,efektif%20dalam%20mendukung%20pencapaian%20tujuan>
- Albarkah, N. R., Kartini, D. S., & Saefulrahman, I. (2024). Perencanaan Strategis Pada Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 Di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 1607-620.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). (2013, Desember 30). *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)*. Jakarta.

- BPKP. (2018). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko*. Jakarta: BPKP.
- BPKP. (2020). *Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah*. Jakarta: BPKP.
- Bryson, J. M. (2011). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: a guide to strengthening and sustaining organizational achievement-fourth edition*. San Francisco: Jossey Bass.
- Bryson, J., Edwards, L. H., & Van Slyke, D. (2018). Getting strategic about strategic planning research. *Public Management Review*, 317-339.
- Chairunnisa, F., & Pamungkas, B. (2020). *Designing a Risk-Based Review Plan for Accrual Based Local Government Financial Reports*. Depok: AFEBI Accounting Review (AAR).
- Ginanjari, Y., & Ratmoko, K. (2016). PERENCANAAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG DARAT DALAM PENGUATAN KABUPATEN BANDUNG DARAT DALAM PENGUATAN EKONOMI ASEAN. *Dinamika Global*, 103-122.
- Gunawan, I., Santony, J., & Sumijan. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Program Kerja Pengawasan Tahunan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi*, 48-52.
- Haraidi, B. W., & Slamet. (2020). ANALISIS PERENCANAAN AUDIT INTERN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK. *Accounting and Business Information Systems Journal*.
- Herdiono, W. F., Marsudi, & Nugroho, R. A. (2021). Perencanaan Strategi Pengembangan Potensi Desa Cemoroh Sebagai Desa Wisata Berbasis Masyarakat dan Budaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 279-290.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong. (2023, November 20). *Bimtek Penyusunan PKPT Berbasis Risiko*. Diambil kembali dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong: <https://inspektorat.tabalongkab.go.id/view/berita/2023-11-20-bimtek-penyusunan-pkpt-berbasis-resiko#:~:text=Audit%20Berbasis%20Risiko%20,ditetapkan%20manajemen%20pada%20tingkatan%20korporasi>
- Inspektorat Daerah Kota Bogor. (2023, Desember 20). *Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024*. Diambil kembali dari Inspektorat Daerah Kota Bogor: <https://inspektorat.kotabogor.go.id/beritalist/read/307#:~:text=Inspektora%20Daerah%20Kota%20Bogor%20melakukan,hari%20Rabu%2C%20%20Desember%202023>
- Inspektorat Daerah Kota Bogor. (2024, 12 19). *Inspektorat Daerah Kota Bogor Gelar Pembahasan PKPT Berbasis Risiko Tahun 2025*. Diambil kembali dari

Inspektorat Daerah Kota Bogor:
<https://inspektorat.kotabogor.go.id/beritalist/read/575#:~:text=Dalam%20pembukaan%20kegiatan%2C%20Inspektur%20Daerah,nyata%20bagi%20masyarakat%2C%E2%80%9D%20ujar%20Pupung>

- Kapita, S. N., Suryadi, & Rochmah, S. (2022). Proses Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Dalam Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (Studi Pada PPID Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 123-129.
- Khakim, N. (2013). *Perencanaan Strategis Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Di Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi*. STKIP Kusuma Negara.
- Lidimilah, L. F., & Prasetyo, J. D. (2020). Optimalisasi Sistem Informasi Untuk Efektifitas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 93-107.
- Maryani, N., & Sastradipraja, U. (2020). Peranan Audit Investigatif dalam menjadikan Bukti Audit sebagai Bukti Hukum untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 116-147.
- Maulana, D. S., Wardayanti, S. M., Kustono, A. S., & Wasito. (2024). *Analysis Of The Preparation of Risk-Based Annual Supervision Work Program (PKPT) At The Banyuwangi Regency Inspectorate*. Jember: Journal of Social Research.
- Mulyandini, V. C., & Anggionaldi, M. (2024). Peran Kecerdasan Buatan Dalam Mendeteksi Kecurangan Keuangan: Studi Kasus Pada Proses Audit Forensik. *AKUNTOTEKNOLOGI : JURNAL ILMIA AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*, 1-11.
- Natita, R. K., & Maryani, N. (2023). The Effect of Online Communication and Use of Information Systems on Audit Quality. *International Journal of Quantitative Research and Modeling*, 96-103.
- Oktapiani, F., Rosmiati, M., & Indrawati, L. (2021). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 378-385.
- Pemerintah Kabupaten Bandung. (2023, April 26). *PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG*. Bandung: Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Rahayu, S. D., & Hartikayanti, H. N. (2023). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada BUMDes Bangkit Sejahtera). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 183-206.
- Rahmawati, L. D. (2015). *Analisis Perubahan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diambil kembali dari Universitas Gadjah Mada: etd.repository.ugm.ac.id

- Rahmayani, I., Ningrum, S., & Sukarno, D. (2021). Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis Dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Administrasi Negara*, 69-74.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 127.
- Research and Development LSP MKS. (t.thn.). *Modul Risk Management Professional (RMP) Pengembangan Penerapan Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000*. Research and Development LSP MKS.
- Retnandari, N. D. (2022). Implementation of Strategic Planning in Regional/ Municipal Governments, Obstacles and Challenges. *Policy & Governance Review*, 155-175.
- Siradja, N. G., Alam, A. S., & Samsu, S. (2012). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 75-84.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suherlan, D., Mulyandani, V. C., & Mulyandini, V. C. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 258-264.